

## **DETERMINAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Lestavira Finakesti <sup>1)</sup>, Siska Aprianti <sup>2)</sup>, Bainil Yulina <sup>3)</sup>, Sri Hartaty <sup>4)</sup>**

<sup>1-4</sup> Prodi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

<sup>2)</sup>email: siskaaprianti@polsri.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang telah di audit oleh BPK RI pada periode 2015-2019. Total sampel 17 Kabupaten/Kota sebagai sampel, yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan software SPSS versi 25. Temuan penelitian menunjukkan bahwa variabel kekayaan daerah, rasio kemandirian daerah, Jumlah OPD, ketergantungan dan ukuran legislatif memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Implikasi penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengembangan, misalkan menambahkan variabel penelitian lain yang mungkin mempengaruhi pengungkapan pemerintah daerah, serta memperluas objek penelitiannya agar cakupannya yang tidak hanya pada sektor publik sebagai objek namun ke sektor privat.

**Kata Kunci:** *Pengungkapan, Pemerintah,, Kekayaan, Kemandirian*

### **Abstract**

*This study examines the factors that influence the disclosure of local government financial statements in South Sumatra Province. The data used are local government financial reports that have been audited by BPK RI in the 2015-2019 period. A total sample of 17 districts/cities as a sample, which was analyzed using multiple linear regression with SPSS software version 25. The research findings indicate that the variables of regional wealth, regional independence ratio, number of OPD, dependence and legislative size have a significant positive influence on financial statement disclosure. The implications of further research can be developed, for example adding other research variables that might affect local government disclosure, as well as expanding the object of research so that its scope is not only in the public sector as an object but also in the private sector.*

**Keywords:** *Disclosure, Government, Wealth, Independence,*

### **1. PENDAHULUAN**

Pemerintah daerah ialah perlengkapan dalam pengelolaan pemerintahan. Pemerintah daerah merujuk pada yurisdiksi administratif sesuatu wilayah yang lebih kecil dari suatu negara, Indonesia ialah area yang terdiri dari wilayah provinsi. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, melaporkan pemimpin suatu provinsi, kabupaten serta kota, bertanggung jawab melaporkan sendiri informasi

keuangannya. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 menerangkan Kepala negara, Gubernur, Bupati serta Walikota bertanggung jawab menyampaikan Informasi mengenai Realisasi APBN atau APBD, Neraca, Informasi Arus kas, serta Catatan atas Laporan Finansial, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD.

Pelaporan finansial merupakan *ouput* proses akuntansi. Laporan finansial memberikan informasi relevan tentang posisi

finansial dan transaksi-transaksi finansial dalam periode pelaporan. Informasi finansial ini dipakai oleh pengguna laporan dalam merencanakan, mengendalikan dan mengambil keputusan. Melalui laporan keuangan dapat diketahui nilai sumber daya ekonomi sehingga kondisi keuangan, pelaksanaan operasional pemerintahan, evaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan diketahui, dan membantu menjalankan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah merupakan pihak penerima mandat untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam membuat laporan keuangan tersebut. Menurut Syafitri & Setyaningrum, (2012) “Transparansi digunakan oleh pemda sebagai akses informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat”. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan kebijakan yang dilaksanakan oleh entitas pelaporan untuk mencapai tujuan tertentu.

Transparansi dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan pemerintahan daerah terwujud melalui penyampaian informasi laporan finansial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, pemerintah daerah wajib melakukan pengungkapan lengkap (*full disclosure*). Pengungkapan lengkap diwujudkan dengan penyajian semua data-data penting bagi pemakai laporan keuangan, baik yang disampaikan lembar awal laporan keuangan, maupun pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain itu, melalui pengungkapan diharapkan akan menciptakan tata kelola yang baik. Pengungkapan informasi pun berpengaruh ekonomis serta substansial dalam pengambilan keputusan.

Nor *et al.*, (2019) menyatakan pada tahun 2015 dari 34 pemerintah daerah (pemda) hanya 16 pemda yang melakukan pengungkapan laporan keuangan melalui website, sedangkan 18 lainnya tidak mengungkapkannya. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan, dimana jumlah pemerintah daerah yang mengungkapkan laporan keuangannya yaitu menjadi 17, sedangkan sisanya yaitu 17 Pemda masih belum mengungkapkan laporan keuangannya kepada publik. Beberapa faktor diduga menjadi alasan yang melatarbelakangi kenapa pengungkapan laporan keuangan ini masih

rendah. Misalnya temuan Lutfia *et al.*, (2018) menunjukkan PAD, SKPD, ukuran pemda, rasio kemandirian, umur pemda, ukuran legislatif dan *intergovernmental revenue* memiliki hubungan dengan pengungkapan LKPD. Sejalan dengan itu, temuan Amaliah, (2019) membuktikan tingkat ketergantungan daerah, PAD, belanja modal, populasi dan banyaknya temuan hasil audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan LKPD. Sebaliknya, temuan Liza & Arza, (2019) menunjukkan ukuran pemda, umur pemda, jumlah SKPD, tingkat ketergantungan, rasio kemandirian keuangan, kekayaan daerah, opini audit dan *profitability* rasio tidak memiliki berpengaruh dengan pengungkapan LKPD. Begitu pula temuan Andriani *et al.*, (2019) menunjukkan ukuran pemda, tingkat ketergantungan, umur pemda, ukuran legislatif, jumlah penduduk, PAD, diferensial fungsional dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan LKPD.

Masih terbatasnya penelitian sehubungan dengan topik pengungkapan laporan keuangan di sektor pemerintahan, dan terbatasnya akses publik terhadap informasi dan data pemerintah secara bebas dan cenderung rahasia menjadikan penelitian ini menarik untuk diteliti kembali. Ketidakkonsistenan temuan riset terdahulu mengenai faktor pendorong pemerintah daerah mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah pun menjadi semakin menarik untuk diteliti lebih lanjut.

## 2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori *Stewardship* dalam Pemerintahan

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship*. Anton (2010) menyatakan bahwa teori *stewardship* diciptakan untuk menguji suatu kondisi dimana manajemen perusahaan merupakan pelayan yang seharusnya berperilaku sebaiknya mungkin demi kepentingan para prinsipalnya. Dasar psikologi dan sosiologi yang dirancang dalam Teori *Stewardship* menyatakan bahwa penerima amanat (*steward*) akan melaksanakan tugasnya dalam mencapai tujuan organisasi guna memenuhi amanat pemilik modal (*principal*). Sedangkan Khasanah (2014) mendeskripsikan *Stewardship* sebagai hubungan yang terjadi antara prinsipal yang bertindak sebagai pihak yang memberikan amanah dengan pemerintah yang bertindak

sebagai *steward*, sebagai hubungan yang dibangun berdasarkan kepercayaan, dimana sesuai sifat dasarnya bahwa manusia dapat berperilaku yang bertanggung jawab, berintegritas serta tidak merugikan orang lain. Adanya pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah merupakan wujud dari pertanggungjawaban dan terlaksananya *good governance* pemerintah sebagai *steward* atas semua sumber daya yang diamanahkan kepadanya.

### **Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

UU Keuangan Negara dan UU Pemeriksaan Keuangan Negara menyebutkan bahwa setiap kepala daerah baik pada tingkat Gubernur, Bupati maupun Walikota berkewajiban menyampaikan LKPD kepada BPK minimal 3 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran. Pihak BPK kemudian memiliki waktu selama 2 bulan untuk memeriksa penyampaian LKPD tersebut, apakah laporan yang disampaikan telah disajikan secara wajar.

Selain menyampaikan LKPD, baik pemerintah pusat atau daerah juga wajib menyampaikan pengungkapan informasi dalam laporan keuangannya dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa pengungkapan yang lengkap (*full disclosure*) merupakan bagian dari laporan keuangan yang disertai dengan penyajian informasi yang dibutuhkan oleh pengguna secara lengkap. Informasi yang dibutuhkan tersebut dapat ditempatkan baik pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan ataupun disampaikan dalam bagian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### **Pengembangan Hipotesis Kekayaan Daerah**

Pendapatan daerah merupakan sejumlah uang yang masuk ke rekening kas umum daerah, yang menyebabkan bertambahnya ekuitas dana dalam 1 tahun berjalan, dimana daerah tidak perlu melakukan pengembalian atas penerimaan tersebut. Termasuk ke dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (Tarigan & Kawedar, 2020). Semua penghasilan baik

berupa pajak daerah ataupun retribusi daerah diterima dari masyarakat. Sehingga jika dilihat dari teori *stewardship* maka sudah selayaknya pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya besarnya hasil kekayaan daerah yang dan banyaknya sumber daya yang diterima, dengan meningkatkan pengungkapan informasi finansialnya secara lebih baik. Kekayaan daerah yang tinggi menunjukkan kinerja yang dimiliki daerah tersebut semakin baik. Hal ini akan mendorong semakin banyaknya informasi yang harus disampaikan oleh pemerintah daerah kepada para *stakeholders* yang seharusnya diungkapkan dalam LKPD.

Penelitian Hilmi & Martani (2012) menunjukkan kekayaan yang dimiliki daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan LKPD, dimana jika tingkat kekayaan daerah meningkat maka pengungkapan yang dilakukan pemerintah daerah/kota juga akan naik. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian Patrick (2007) membuktikan variabel ukuran pemerintah daerah diprosikan melalui kekayaan yang dimiliki daerah, berhubungan positif dengan pengungkapan LKPD. Sehingga hipotesis ke 1 : **H<sub>1</sub>: Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Pengungkapan LKPD**

### **Tingkat Ketergantungan**

Besarnya tingkat ketergantungan kemungkinan akan mengakibatkan pemerintah pusat membatasi operasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah/kota, dengan menuntut pengungkapan secara lebih banyak guna memantau kinerja dari pemerintah daerah/kota tersebut dengan melakukan pembatasan atas operasi pemerintah daerah/kota setempat. Artinya tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan akan semakin besar ketika tingkat ketergantungan pemerintah daerah/kota semakin besar (Robbins & Austin, 1986). Hasil penelitian Anggara & Cheisviyanny (2020) dan Pandansari (2016) menemukan hubungan positif dan signifikan antara tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Dimana semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat maka pemerintah daerah akan melakukan pengungkapan informasi keuangan secara lebih mendetail. Sehingga hipotesis ke 2 adalah:

## **H<sub>2</sub>: Tingkat ketergantungan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan LKPD**

### **Rasio Kemandirian**

Kemampuan lembaga mengelola urusan keuangan dalam negeri mereka secara mandiri disebut sebagai otonomi daerah (Petkovska, 2011). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri, begitupun ketika melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga ketika pemerintah daerah memiliki tingkat rasio kemandirian yang tinggi maka tuntutan untuk melakukan pengungkapan secara transparan atas laporan keuangan akan semakin besar untuk memberikan keyakinan kepada publik bahwa kegiatan pemerintahan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan (*Prasasti et al.*, 2017).

Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan daerah. Jika kemandirian keuangan daerah meningkat maka tingkat ketergantungan daerah atas sumber dana dari pihak eksternal akan semakin rendah, sehingga pemerintah daerah akan mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah (Suparno & Nanda, 2016). Sehingga hipotesis ke 3:

## **H<sub>3</sub>: Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Pengungkapan LKPD**

### **Jumlah OPD**

Ketika suatu pemerintahan mengopersionalisasikan kegiatannya dengan semakin kompleks maka informasi yang harus disampaikan oleh pemerintahan tersebut akan semakin kompleks pula. Sehingga dengan demikian pembaca laporan keuangan akan membutuhkan informasi yang semakin mendalam guna memahami informasi tersebut yang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingginya tingkat pengungkapan pemerintah daerah/kota. Banyaknya jumlah OPD dalam suatu pemerintah daerah/kota menunjukkan ke kompleksitasan tersebut.

Daerah yang memiliki jumlah OPD yang besar, memiliki sistem pemerintahan yang kompleks. Pada pemerintahan yang kompleks, tuntutan untuk mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan akan semakin besar (Hilmi & Martani, 2012).

Ridwan & Yahya, (2020) membuktikan t hubungan positif antara jumlah SKPD dengan Pengungkapan LKPD Kabupaten dan Kota di Aceh. Sejalan dengan itu Patrick (2007) membuktikan pimpinan wilayah Pennsylvania di erensiasi fungsional cenderung mengadopsi GASB 34 secara lebih luas, dibandingkan pimpinan wilayah pada tingkat diferensiasi fungsional yang lebih rendah. Sehingga hipotesis ke 4 adalah:

## **H<sub>4</sub>: Jumlah OPD berpengaruh positif terhadap Pengungkapan LKPD**

### **Ukuran Legislatif**

Di negara Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sebagai badan legislatif untuk memastikan bahwa anggaran dikelola secara benar oleh pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, DPRD mengawasi pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan dan pelaporan informasi finansial pemerintah daerah berdasarkan aspirasi masyarakat. Tindakan yang dilakukan anggota legislatif (*principal*) merupakan suatu bentuk pengendalian terhadap pemerintah daerah (*steward*) dalam menjalankan tugas yang diamanatkan. Jika peran DPRD sebagai pengawas keuangan berjalan dengan baik, maka kebijakan keuangan daerah dapat dikendalikan secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Lutfia *et al.*, 2018).

Hal ini menggambarkan bahwa ada porsi DPRD ketika mengawasi alur kebijakan keuangan dalam pemerintah daerah. Banyaknya anggota legislatif seharusnya dapat mendorong pengawasan terhadap pemda, dimana semakin banyak individu yang tergabung dalam legislatif, akan sebanding dengan semakin meningkatnya proses kontrol yang akan dilakukan oleh legislatif tersebut. Andriani *et al.*, (2019) dan Lutfia *et al.*, (2018) membuktikan jumlah legislatif memiliki pengaruh positif atas pengungkapan laporan keuangan. Sehingga hipotesis ke 5 adalah :

## **H<sub>5</sub>: Ukuran Legislatif berpengaruh positif terhadap Pengungkapan LKPD**

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel**

Teknik pengambilan sampel dadlam penelitian ini adalah menggunakan sampel jenuh. Populasi dan sampelnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang

berjumlah 17 kabupaten dan kota, terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota. Menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015-2019 yang telah di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data diperoleh melalui laman <http://sumsel.bpk.go.id>. Kemudian data diolah menggunakan *software* SPSS versi 25 for windows.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **Pengungkapan LKPD**

Pengungkapan LKPD merupakan perbandingan antara jumlah item pengungkapan dalam LKPD pemerintah Daerah dengan jumlah pengungkapan maksimal yang seharusnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengungkapan LKPD menggambarkan besarnya tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh. Pengungkapan LKPD dalam penelitian ini diukur sebagai berikut:

$$\text{Pengungkapan} = \frac{\text{Item Pengungkapan LKPD}}{\text{Total Pengungkapan SAP}}$$

#### **Kekayaan Daerah**

Kekayaan daerah merupakan total pendapatan yang dimiliki oleh daerah baik pendapatan yang diperoleh dari pajak, pungutan/retribusi, ataupun pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dikelola secara terpisah serta lain-lain PAD yang dipisahkan, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \text{Total PAD}$$

#### **Tingkat Ketergantungan**

Tingkat ketergantungan merupakan besarnya kemampuan yang dimiliki oleh daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah dengan cara mengotimalkan PAD.

Ketergantungan ini diprosikan melalui besarnya dana transfer yang diterima dari pusat dana atau Dana Alokasi Umum (DAU). Tingkat ketergantungan diukur sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Ketergantungan} = \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan}}$$

#### **Rasio Kemandirian**

Rasio kemandirian menunjukkan besarnya level ketergantungan pemerintah di daerah atas sumber-sumber dana yang berasal dari pihak ekstern. Rasio kemandirian diprosikan dengan perbandingan total pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan transfer dan kewajiban, atau dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pend.Transfer} + \text{Tot.Kewajiban}}$$

#### **Jumlah OPD**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah yang bertanggung jawab secara langsung kepada para kepala daerah. Dalam penelitian ini variabel OPD diprosikan melalui OPD yang ada di suatu daerah, yang dirumuskan berikut :

$$\text{OPD} = \text{Jumlah OPD}$$

#### **Ukuran Legislatif**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu unsur yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyaknya jumlah anggota DPRD digunakan untuk mengukur variabel ukuran legislatif, atau dirumuskan berikut :

$$\text{Ukuran Legislatif} = \text{Jumlah Anggota DPRD}$$

Pada Tabel 1 disajikan ringkasan pengukuran untuk masing-masing variabel:

**Tabel 1**  
**Ringkasan Pengukuran Variabel**

<b>Variabel Dependen (Y) :</b> Tingkat pengungkapan LKPD	Pengungkapan = $\frac{\text{Item Pengungkapan LKPD}}{\text{Total Pengungkapan SAP}}$
<b>Variabel Dependen (X) :</b> Kekayaan Daerah (PAD)	= Total PAD
Tingkat Ketergantungan	= $\frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan}}$
Rasio Kemandirian	= $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer} + \text{Total Kewajiban}}$
Jumlah OPD	= Jumlah OPD
Ukuran Legislatif	= Jumlah Anggota DPRD

**Model Penelitian**

Model persamaan regresi adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{TK} + \beta_3 \text{RK} + \beta_4 \text{OPD} + \beta_5 \text{UL}$$

Keterangan :

- Y = Pengungkapan LKPD
- X1 = Kekayaan Daerah
- X2 = Tingkat Ketergantungan
- X3 = Rasio Kemandirian
- X4 = Jumlah OPD
- X5 = Ukuran Legislatif
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Koefisien regresi

**4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Statistik Deskriptif**

Tabel 2 menyajikan hasil statistik deskriptif yang menggambarkan nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk setiap kabupaten ataupun kota di Provinsi Sumatera Selatan. Nilai paling kecil sebesar

45,94% diperoleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2016. Sedangkan nilai maksimum sebesar 97,05% diperoleh Kabupaten Ogan Komering Ilir 2015. Ini menunjukkan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan Pengungkapan dalam LKPDnya secara maksimal. Skor pengungkapan rata-rata adalah 63,10 yang berarti secara umum pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan melakukan Pengungkapan LKPD sebanyak 63%. Nilai standar deviasi yang diperoleh sebesar 18,00 atau 18%. Hal ini menggambarkan bahwa penyebaran data baik. Karena nilai rata-rata lebih tinggi jika dibandingkan standar deviasi, artinya sebaran data tidak jauh berbeda atau simpangan datanya relatif kecil. Pengungkapan LKPD dapat dikatakan tinggi, mengingat nilainya yang sudah mendekati 100%. Artinya pemerintah di daerah kabupaten dan kota yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir, telah melakukan pengungkapan dalam LKPD an (SAP) secara maksimal.

**Tabel 2**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengungkapan LKPD	85	45,94	97,05	63,10	18,00
Kekayaan Daerah	85	10,34	12,04	11,00	,36
Tingkat Ketergantungan	85	6,44	58,00	41,33	10,94
Rasio Kemandirian	85	,04	44,74	9,25	7,39
Jumlah OPD	85	30	60	45,85	7,81
Ukuran Legislatif	85	20	45	33,94	7,91
Valid N (listwise)	85				

Sumber : Hasil uji SPSS

Variabel kekayaan daerah untuk kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai terendah sebesar 10,34 atau sebesar Rp22.025.377.405,07 diperoleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun 2015. Sedangkan nilai maksimum sebesar 12,04 atau sebesar Rp1.091.704.605.854,90 diperoleh Kota Palembang pada tahun 2017. Nilai rata-rata kekayaan daerah sebesar 11,00 atau sebesar Rp154.806.696.551,48. Nilai standar deviasi yang diperoleh sebesar 0,36 atau sebesar Rp206.243.952.183,67. Hal ini menunjukkan adanya sebaran data yang cukup baik, mengingat skor rata-rata yang diperoleh nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar deviasi. Artinya sebaran datanya tidak jauh berbeda, atau bisa dikatakan juga kalau simpangan datanya cukup kecil.

Tingkat ketergantungan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai terendah sebesar 6,44 diperoleh Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2015. Sedangkan nilai maksimum sebesar 58 diperoleh Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015. Nilai rata-rata tingkat ketergantungan sebesar 41,33 atau 41. Nilai standar deviasi tingkat ketergantungan sebesar 10,94 atau 11. Hal ini menunjukkan adanya sebaran data yang cukup baik karena skor rata-rata lebih tinggi jika dibandingkan standar deviasi, artinya simpangan datanya relatif kecil.

Rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai terendah sebesar 0,04, diperoleh Kabupaten Musi Rawas Utara 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah di daerah belum mampu untuk membayar sendiri pelaksanaan operasional pemerintahan, melaksanakan pembangunan ataupun memberikan layanan ke masyarakat

dengan maksimal. Sedangkan nilai maksimum sebesar 44,74 diperoleh Kota Palembang 2017. Nilai rata rata rasio kemandirian keuangan pada pemerintah di daerah sebesar 9,25 atau 9. Standar deviasinya sebesar 7,39 atau 7. Hal ini menunjukkan sebaran data yang cukup baik karena nilai rata-rata lebih tinggi dari pada i standar deviasi, berarti simpangan datanya cukup kecil.

Jumlah OPD kabupaten dan kotayang ada di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai terkecil 30 diperoleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya jumlah sumber daya manusia di daerah tersebut untuk tahun 2016. Sedangkan nilai maksimum sebesar 60 diperoleh Kabupaten Muara Enim 2019. Nilai rata-rata jumlah OPD sebesar 45,28 atau 45. Nilai standar deviasi jumlah OPD sebesar 7,81 atau 8. Hal ini menunjukkan sebaran data cukup baik karena skor rata-rata lebih tinggi dari standar deviasi, berarti simpangan datanya relatif kecil.

Ukuran legislatif kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai terendah sebesar 20 diperoleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2016. Hal ini menunjukkan ukuran legislatif yang dilihat dari jumlah DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2016 masih sangat rendah. Nilai tertinggi 45 diperoleh Kota Palembang tahun 2017. Nilai rata-rata ukuran legislatif sebesar 32,94 atau sebesar 33. Nilai standar deviasi ukuran legislatif sebesar 7,91 atau 8. Ini menunjukkan sebaran data cukup baik sebab nilai rata-rata lebih tinggi dari standar deviasi, artinya simpangan datanya relatif kecil.

### Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

Ringkasan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 3 berikut:

**Tabel 3.**

#### Hasil Uji Hipotesis

Variabel	t	Sig.	Keterangan
Kekayaan Daerah	3,639	,010	H1 diterima
Tingkat Ketergantungan	2,112	,009	H2 diterima
Rasio Kemandirian	3,736	,004	H3 diterima
Jumlah OPD	2,876	,022	H4 diterima
Ukuran Legislatif	2,065	,040	H5 diterima

Sumber : Hasil output SPSS

Hasil uji-t dan nilai signifikansi dari tiap variabel independen yang terdiri dari Kekayaan

Daerah, Tingkat Ketergantungan, Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah,

Jumlah OPD, dan Ukuran Legislatif) yang merupakan indikator penerimaan atau penolakan hipotesis dijelaskan pada Tabel 3.

Variabel Kekayaan Daerah memiliki nilai t-hitung 3,639 dan signifikan sebesar 0,010. Nilai t-hitung (3,639) lebih tinggi daripada nilai t-tabel (1,99045) serta nilai signifikan lebih rendah daripada 0,05 ( $0,010 < 0,05$ ). Artinya kekayaan yang dimiliki daerah memiliki pengaruh atas Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga **H<sub>1</sub> diterima**. Sejalan dengan riset Lutfia *et al.*, (2018) dan Purnama & Alfina, (2019) wilayah yang memiliki aset daerah dalam jumlah yang banyak umumnya memiliki ketersediaan jumlah sumberdaya yang tidak terbatas, sehingga wilayah tersebut akan melaksanakan pengungkapan informasi keuangannya dengan tingkat yang tinggi. Menurut filosofi *stewardship*, pimpinan wilayah berupaya membuktikan tanggung jawab kinerjanya melalui banyaknya hasil kekayaan dan sumber daya, dengan demikian pimpinan wilayah akan berusaha melakukan pengungkapan secara lebih baik pada laporan finansialnya. Terdapatnya kenaikan pengungkapan diharapkan sanggup mengurangi asimetri data antara penguasa dengan rakyatnya

Variabel Tingkat Ketergantungan memiliki nilai t-hitung 2,112 dengan signifikan sebesar 0,009. Berarti thitung (2,112) lebih tinggi dari nilai t-tabel (1,99045) serta nilai signifikan lebih rendah daripada 0,05 ( $0,009 < 0,05$ ), sehingga dapat dikatakan ketergantungan daerah memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga **H<sub>2</sub> diterima**. Sejalan riset Amaliah (2019), ketika daerah memiliki ketergantungan kepada pusat maka pemerintah pusat akan menuntut daerah untuk melakukan pengungkapan secara lebih luas kepada daerah. Tuntutan ini muncul sebagai wujud pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh daerah atas dana yang ditransfer ke kas daerah. Untuk memenuhi tuntutan tersebut maka daerah berkewajiban untuk melaksanakannya dalam bentuk menyampaikan informasi keuangan secara lebih kepada pusat dalam bentuk pengungkapan secara mendetail atas informasi finansial yang disampaikan.

Variabel Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah memiliki t-hitung 3,736 dan nilai signifikan sebesar 0,004. Hal tersebut menunjukkan nilai t-hitung (3,736) lebih tinggi

dari t-tabel (1,99045) dan signifikan lebih rendah daripada 0,05 ( $0,004 < 0,05$ ), sehingga dapat dikatakan bahwa Rasio Kemandirian atas Keuangan Daerah mempengaruhi Pengungkapan yang ada dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga **H<sub>3</sub> diterima**. Sejalan dengan Lutfia *et al.*, (2018), melakukan pengungkapan LKPD secara lebih mendalam merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah wilayah ketika memperoleh otonomi keuangan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kontribusinya baik dalam bentuk pembayaran pajak ataupun retribusi lainnya. Dipandang dari teori *stewardship*, agen sebagai pelaksana akan bertindak sesuai dengan tuntutan prinsipalnya. Sehingga untuk memperoleh atensi dari masyarakat sebagai prinsipal, maka pemerintah daerah sebagai agen berusaha semaksimal mungkin menyampaikan informasi finansial berupa pengungkapan secara lebih transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.

Variabel Jumlah OPD memiliki t-hitung 2,876 dan signifikansi 0,022. Terlihat bahwa t-hitungnya (2,876) lebih tinggi daripada t-tabel (1,99045) dan signifikansi lebih rendah dari 0,05 ( $0,022 < 0,05$ ), sehingga dapat dikatakan Jumlah OPD mempengaruhi pengungkapan LKPD, sehingga **H<sub>4</sub> diterima**. Temuan ini sejalan dengan Lutfia *et al.*, (2018), Hilmi & Martani, (2012) dan Liza & Arza, (2019). Banyak OPD dalam suatu wilayah ditunjukkan dengan kompleksitas pemerintah di wilayah tersebut. Jumlah OPD yang semakin bertambah seharusnya akan mendorong penyampaian informasi finansial yang semakin tinggi dalam rangka mengurangi asimetri informasi, dimana hal ini akan mencerminkan kemampuan kerja *steward* yang semakin baik. Namun hasil riset ini tidak mendukung Purnama & Alfina, (2019) yang tidak menemukan pengaruh antara jumlah SKPD terhadap pengungkapan LKPD.

Variabel Ukuran Legislatif memiliki nilai t-hitung 2,065 dan nilai signifikan 0,040. artinya t-hitung (2,065) lebih tinggi dari nilai t-tabel (1,99045) dan signifikan lebih rendah dari 0,05 ( $0,040 < 0,05$ ), dapat dikatakan ukuran legislatif mempengaruhi pengungkapan LKPD, sehingga **H<sub>5</sub> diterima**. Sejalan dengan Lutfia *et al.*, (2018), salah satu tugas penting bagi DPRD ialah melaksanakan pengawasan atas implementasi peraturan perundang-undangan, peraturan bupati, ketetapan bupati serta kebijaksanaan yang telah disahkan oleh pimpinan



wilayah. Ketika jumlah orang-orang yang duduk sebagai anggota DPRD bertambah/meningkat, artinya individu yang duduk sebagai anggota DPRD semakin akan memberikan tekanan kepada pimpinan wilayah melakukan pengungkapan secara lengkap. Sehingga banyaknya anggota dewan seharusnya akan mendorong pemerintah wilayah meningkatkan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun temuan riset ini tidak sama dengan Purnama & Alfina, (2019) yang tidak menemukan pengaruh antara jumlah jumlah anggota DPRD terhadap pengungkapan dalam LKPD.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Temuan uji statistik dan analisis terhadap data menunjukkan kekayaan di daerah memiliki mempengaruhi pengungkapan dalam LKPD secara signifikan, sehingga H1 diterima. Besaran ketergantungan daerah mempengaruhi pengungkapan dalam LKPD secara signifikan, sehingga H2 diterima. Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah mempengaruhi Pengungkapan dalam LKPD dengan signifikan, sehingga H3 diterima. Jumlah OPD dalam suatu wilayah mempengaruhi pengungkapan dalam LKPD secara signifikan sehingga H4 diterima. Ukuran Legislatif mempengaruhi pengungkapan LKPD secara signifikan, sehingga H5 diterima.

### Saran

Sebagian keterbatasan dalam riset ini yang diharapkan bisa diperbaiki pada riset berikutnya, ialah: hasil riset ini membuktikan jika pengungkapan informasi finansial pemerintah daerah di Sumatera Selatan belum sempurna. Karenanya, pemerintah daerah dianjurkan mempraktikkan sistem *rewards and punishment* dengan jelas sehingga pemerintah daerah lebih patuh kepada peraturan perundangan yang sah. Periset berikutnya diharapkan mengkaji pengungkapan informasi finansial pemerintah daerah yang memang sudah mempraktikkan dasar aktual, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 sehingga evaluasi pengungkapannya akan lebih seimbang. Subjek riset ini adalah pemerintah yang ada di daerah kabupaten ataupun kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 – 2019, riset berikutnya sebaiknya menggunakan subjek penelitian dengan cakupan lebih besar misalnya menggunakan sektor privat. Riset berikutnya

dapat menggunakan variabel- variabel yang lain, yang mempengaruhi pengungkapan pemerintah daerah.

## 6. REFERENSI

- Amaliah, H. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Jurnal Akuntansi*, Vol.8(No. 2).
- Andriani, M., Elfitri, S., & Mustika, R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014-2016. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, Vol.14(No.1.).
- Anggara, E., & Cheisviyanny, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2162–2184. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.205>
- Anton, F. X. (2010). Menuju Teori Stewardship Manajemen. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1(2), 61–80.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1–26.
- Khasanah, N. L. (2014). *Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Diponegoro.
- Liza, W. J., & Arza, F. I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 959–976. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.120>
- Lutfia, F. I., Maryono, & Bagana, B. D. (2018). Determinan Tingkat Pengungkapan

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014-2016). *Dinamika Akuntansi Dan Perbankan*, 7(1), 82–95.
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites: A quest of its determinant(s). *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 112–128. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2019-0043>
- Pandansari, T. (2016). Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(3), 463. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i3.366>
- Patrick, P. A. (2007). *The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Pennsylvania State University.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Petkovska, S. (2011). *An analysis of financial autonomy in Macedonian higher education*. University of Aveiro.
- Prasasti, A. M., Rahayu, S., & Zutilisna, D. (2017). Opini Audit, Tingkat Kemandirian, Dan Tipe Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 94–103. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.584>
- Purnama, H. P., & Alfina, P. (2019). Which ones are more important: characteristics or complexities? A study of the disclosure in local government financial reports. *Journal of Business and Information Systems (e-ISSN: 2685-2543)*, 1(2), 77–88. <https://doi.org/10.36067/jbis.v1i2.24>
- Ridwan, M., & Yahya, M. R. (2020). Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Temuan Audit Bpk, Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 429–437. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.16055>
- Robbins, W. A., & Austin, K. R. (1986). Disclosure Quality in Governmental Financial Reports: An Assessment of the Appropriateness of a Compound Measure. *Journal of Accounting Research*, 24(2), 412. <https://doi.org/10.2307/2491145>
- Suparno, S., & Nanda, R. (2016). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Diferensiasi Fungsional Dan Spesialisasi Fungsional Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 105–118. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5390>
- Syafitri, F., & Setyaningrum, D. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*.
- Tarigan, A. P. E., & Kawedar, W. (2020). Pengaruh pengungkapan keanekaragaman hayati dalam laporan keberlanjutan terhadap nilai perusahaan dengan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–13.
- Undang-Undang Nomor 17. (2003). *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 23. (2014). *Pemerintahan Daerah*.